

5/H
DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

BUKU LAPORAN TAHUNAN

Tahun Dinas : 2000



MEMBANGUN
MANUSIA KARYA

Jalan Dukuh Menanggal No. 124-126 ☎ 8288930-8284078
SURABAYA

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

BUKU LAPORAN TAHUNAN

Tahun Dinas : 2000



MEMBANGUN
MANUSIA KARYA

Jalan Dukuh Menanggal No. 124-126 ☎ 8288930-8284078
SURABAYA

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KEGIATAN DAN HASIL YANG DICAPAI	
1. Bagian Tata Usaha	2
2. Bidang Binagram	6
3. Bidang Latihan dan Produktivitas	7
4. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja	9
5. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	12
6. Bidang Pengawasan dan Kesehatan Keselamatan Kerja	16
7. Balai Hiperkes dan Kesehatan Kerja	20
8. Kepaniteraan P4D Jawa Timur	22
9. Balai Antar Kerja Antar Negara	23
10. Balai Pengembangan Produktivitas Daerah Jawa Timur	24
BAB III MASALAH/HAMBATAN	25
BAB IV EVALUASI/ANALISA	
1. Bagian Tata Usaha	29
2. Bidang Binagram	29
3. Bidang Latihan dan Produktivitas	29
4. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja	30
5. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	30
6. Bidang Pengawasan dan Kesehatan Keselamatan Kerja	30
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	31
B. Saran	27

KATA PENGANTAR

Sebagaimana rangkuman seluruh kegiatan Rutin dan Pembangunan Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur, maka disusunlah Buku Laporan Tahunan untuk Tahun Dinas 2000, hal ini untuk memenuhi kewajiban berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep. 157/M/SJ/1984 tanggal 01 Juni 1984.

Laporan ini merupakan hasil kegiatan Kanwil Depnaker Propinsi Jawa Timur yang didalamnya menggambarkan tentang hasil-hasil yang telah dicapai, permasalahan yang timbul dan upaya penyelesaiannya serta saran-saran.

Buku laporan ini tersusun berkat kerjasama yang baik antar unit di lingkungan Kanwil Depnaker Propinsi Jawa Timur.

Namun tetap disadari bahwa Buku Laporan Tahunan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Surabaya, Januari 2001

KEPALA KANTOR WILAYAH

Dr. MUZNI TAMBUSAI
NIP. 140058574

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep.Men. 157/M/SJ/1984 tanggal 01 Juni 1984, maka disusunlah laporan tahunan Tahun Dinas 2000 yang meliputi kegiatan Rutin maupun Pembangunan/Proyek di jajaran Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur yang terdiri dari 23 Kandeptaker, 1 Dinas Tenaga Kerja, 7 Balai, 1 Kepaniteraan P4D dan 12 LLKI/LLKUM.

Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Dinas 2000 masih didasarkan pada kebijaksanaan Departemen Tenaga Kerja yaitu DASA KARYA TAMA, target dan petunjuk-petunjuk yang ada baik dalam DIK/DIP dan petunjuk-petunjuk lain dari Pusat. Disamping itu dalam melaksanakan kegiatannya tetap memperhatikan pula hasil-hasil dan evaluasi kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Secara garis besar dapat dilaporkan bahwa program dan kegiatan Tahun Dinas 2000 cukup berhasil sesuai yang direncanakan, bahkan beberapa hal terjadi penonjolan yang berarti, sebagai gambaran dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Realisasi keuangan fisik kegiatan rutin sampai akhir Tahun Dinas dapat dilihat dari alokasi dana sebesar Rp.18.697.535.000,00 dapat direalisasi Rp.18.509.826.000,00 atau 98,68 %
2. Realisasi kegiatan fisik kegiatan pembangunan sampai dengan akhir Tahun Dinas 2000 Dengan dana yang tersedia sebesar Rp.6.984.978.000,00 dapat direalisasi Rp.6.881.275.302,00 atau 99,88 %

Selanjutnya uraian secara rinci akan dipaparkan dalam sistematika dalam bab-bab berikutnya

Adapun sistematika penyusunan laporan tahunan adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------|-----------------------------------|
| BAB I | : PENDAHULUAN |
| BAB II | : KEGIATAN DAN HASIL YANG DICAPAI |
| BAB III | : MASALAH/HAMBATAN |
| BAB IV | : EVALUASI/ANALISA |
| BAB V | : KESIMPULAN DAN SARAN |

BAB II

KEGIATAN DAN HASIL YANG DICAPAI

A. BAGIAN TATA USAHA

1. KEGIATAN RUTIN

- a. Gambaran umum ketenagakerjaan di Jawa Timur dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

Jawa Timur dengan luas wilayah 44.344,85 km² dengan jumlah penduduk 34.486.122 orang, jumlah angkatan kerja umur 15 tahun keatas sebanyak 16.682.174 orang.

Untuk melaksanakan tupoksinya Kanwil Depnaker Propinsi Jawa Timur didukung oleh 23 Kandeptnaker dan 1 Kadinas di Sidoarjo, 4 unit pelaksana teknis dan 2 Balai latihan kerja industri, satu balai latihan kerja UKM dan 12 loka latihan kerja serta Kantor Penghubung meliputi Kabupaten Sampang, Lamongan, Trenggalek, Bondowoso, Ngawi dan Magetan.

- b. Jumlah Pegawai menurut golongan, sebagai berikut :

• Golongan IV	:	54 orang
• Golongan III	:	1.371 orang
• Golongan II	:	461 orang
• Golongan I	:	58 orang

JUMLAH	:	1.930 orang
--------	---	-------------

- c. Pejabat Struktural, sebagai berikut :

• Pejabat Eselon II	:	1 orang
• Pejabat Eselon III	:	35 orang
• Pejabat Eselon IV	:	163 orang
• Pejabat Eselon V	:	31 orang

JUMLAH	:	230 orang
--------	---	-----------

* Untuk Pejabat Eselon III Kandeptnaker Pamekasan belum terisi.

* Untuk Pejabat Eselon IV di Kanwil Depnaker, yaitu Kasi IKK belum terisi.

d. Pejabat Fungsional, sebagai berikut :

• Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan	106	orang
• Pegawai ILK	82	orang
• Litkayasa	8	orang
JUMLAH	196	orang

e. Pegawai Teknis, sebagai berikut :

• Pegawai Perantara	106	orang
• Pegawai Antar Kerja	82	orang
• Pengawas Perantara	8	orang
JUMLAH	196	orang

f. Usulan Kenaikan Pangkat, sebagai berikut :

	Usulan	Realisasi
• Golongan II/d ke bawah	63 orang	61 orang
• Golongan III/a ke atas	314 orang	202 orang
JUMLAH	377 orang	263 orang

g. Ujian Dinas dan UTPP, sebagai berikut :

Melaksanakan ujian dinas dan ujian tertulis sebanyak 2 (dua) kali :

• Ujian Dinas Tk. II	79 orang, Lulus	79 orang
• UTPP Tk. II ke Tk. III	7 orang, Lulus	7 orang

h. Mutasi/Pemindahan Pegawai, sebagai berikut :

• Antar unit di lingkungan Kanwil Depnaker	190	orang
• Masuk ke Jawa Timur	86	orang
• Keluar Jawa Timur	42	orang

i. Pengangkatan dan pemindahan dalam jabatan struktural, sebagai berikut :

• Eselon II	-	orang
• Eselon III	7	orang
• Eselon IV	128	orang
• Eselon V	14	orang
JUMLAH	149	orang

j. Pensiunan Pegawai, sebagai berikut :

- | | | |
|---|---|----------|
| • Usul pensiun karena batas usia | : | 24 orang |
| • Usul janda/duda dari PNS yang meninggal | : | 2 orang |
| • Usul Pensiun karena keuzuran jasmani dan permohonan | : | 7 orang |

k. Hukuman Disiplin, sebagai berikut :

Memproses hukuman disiplin pegawai sebanyak 28 orang, berdasarkan tingkat hukuman disiplin, dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|----------|---|----------|
| • Ringan | : | 14 orang |
| • Sedang | : | 8 orang |
| • Berat | : | 7 orang |

l. Penetapan Angka Kredit Pegawai Fungsional, sebagai berikut :

1) Pengawasan Ketenagakerjaan

- | | | |
|---------------------|---|-----------------|
| • Usul PAK ke Pusat | : | 88 usulan/orang |
| • Memproses SK. PAK | : | 12 SK/orang |

2) Instruktur Latihan Kerja

- | | | |
|---------------------|---|------------------|
| • Usul PAK ke Pusat | : | 227 usulan/orang |
| • Memproses SK. PAK | : | 69 SK/orang |

3) Litkayasa

- | | | |
|---------------------|---|-----------------|
| • Usul PAK ke Pusat | : | 18 usulan/orang |
| • Memproses SK. PAK | : | 5 SK/orang |

m. Kartu Pegawai (KARPEG), sebagai berikut :

Jumlah usulan Karpeg 30 orang, realisasi 13 orang

n. Kartu Istri/Suami (KARIS/KARSU), sebagai berikut :

Usulan	142 orang	Realisasi	87 orang
--------	-----------	-----------	----------

o. Tanda Penghargaan :

Yang mendapatkan penghargaan/kehormatan Satya Lencana sebanyak 20 orang.

p. Tindaklanjut Pemeriksaan

Wasmas

- | | | |
|-----------|---|----------|
| • Kasus | : | 52 kasus |
| • Selesai | : | 51 kasus |
| • Sisa | : | 1 kasus |

PO Box 5000

- | | | |
|-----------|---|----------|
| • Kasus | : | 10 kasus |
| • Selesai | : | 8 kasus |
| • Sisa | : | 2 kasus |

Pemeriksaan IRJEN

• Kasus	:	22	kasus
• Selesai	:	20	kasus
• Sisa	:	2	kasus

Pemeriksaan BPKP

• Kasus	:	2	kasus
• Selesai	:	2	kasus
• Sisa	:	0	kasus

q. Ijin Cuti Pegawai diberikan kepada 277 orang

r. Keuangan

Dana dalam DIK selama Tahun Dinas 2000 sebesar Rp.18.697.535.000,00 dan realisasi Rp.14.592.854.016,00 dengan rincian sebagai berikut :

• Belanja Pegawai	Rp.12.110.962.890
• Belanja Barang	Rp.1.282.449.482
• Belanja Pemeliharaan	Rp.1.105.638.644
• Belanja Perjalanan	Rp.93.803.000

s. Surat menyurat

Komunikasi surat menyurat selama Tahun Dinas 2000 :

• Surat Keluar	:	20.853	buah
• Surat Masuk	:	17.550	buah

t. Dukungan Perlengkapan :

Guna meningkatkan mobilitas pegawai dalam melaksanakan tugas, Kanwil Depnaker Propinsi Jawa Timur didukung perlengkapan sebagai berikut :

• Kendaraan dinas roda 4	:	84	buah
• Kendaraan dinas roda 2	:	288	buah
• Komputer	:	153	buah

2. KEGIATAN PEMBANGUNAN

Jumlah Anggaran Pembangunan Tahun Dinas 2000 :

Kanwil Depnaker Propinsi Jawa Timur beserta unit kerjanya dana yang tersedia sebesar Rp.6.984.978.000,00 sudah termasuk Kandep Surabaya sebesar Rp.175.000.000 untuk rehabilitasi gedung kantor Depnaker Kota Surabaya.

B. BIDANG BINAGRAM

Tugas pokok Bina Program melaksanakan koordinasi, penyusunan rencana dan program, penyusunan/memberikan informasi masalah ketenagakerjaan daerah Tingkat I dan Tingkat II, penyusunan perencanaan tenaga kerja daerah, evaluasi dan laporan, dimana semua kegiatan sumber dananya berasal dari kegiatan rutin dan pembangunan.

1. KEGIATAN RUTIN

- a. Mengadakan koordinasi untuk penyusunan Daftar Usulan Rencana Proyek (DURP) dan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) dengan unit jajaran Kanwil Depnaker, membuat Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS).
- b. Mengkoordinir penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RENKAGIAT) Rutin/Proyek sebagai acuan kegiatan Rutin/Proyek.
- c. Mengadakan kunjungan ke perusahaan dan instansi pemerintah/swasta, kunjungan dimaksud untuk memperoleh data ketenagakerjaan, data tersebut sebagai masukan instansi vertikal dan horizontal yang memerlukan.
- d. Melaksanakan kegiatan koordinasi yang menyangkut perencanaan dan evaluasi dengan Bappeda dan Pemda Propinsi Jawa Timur. Kegiatan rutin/pembangunan di bidang ketenagakerjaan memberikan data dan informasi ke DPRD Tingkat I maupun komisi DPR Pusat.
- e. Menyelenggarakan Rapat Pimpinan (RAPIM), Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) dan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) jajaran Kanwil Depnaker Propinsi Jawa Timur dan PT Jamsostek yang dijadwalkan setiap triwulan atau waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- f. Menyelenggarakan Rapim setiap minggu untuk membicarakan dan memecahkan problem, membuat kegiatan jangka pendek/panjang kaitannya dengan antisipasi masalah yang mendesak, hasilnya dikirim ke Pusat.
- g. Menyusun laporan bulanan, triwulan, tahunan proyek/rutin masing-masing 60 buku sebagai dasar penyusunan laporan daerah, laporan kegiatan rutin/proyek di daerah UPT.

2. KEGIATAN PEMBANGUNAN

Kegiatan pembangunan/proyek di Binagram didukung dana APBN melalui Bagian Proyek IPTKD Jatim Tahun Dinas 2000 sebesar Rp.85.000.000,00
Hasil kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Penyuluhan dan penyebaran informasi meliputi :
Konsultasi program/proyek dan analisa keberhasilan proyek/program 50 buku,
325 exemplar.
- b. Penyusunan rencana program/proyek Tahun Dinas 2000
 - Penyusunan profil ketenagakerjaan dan pemantauan ketenagakerjaan 50 buku
 - Pemantauan kesempatan kerja daerah 50 buku.
 - Penyusunan Lembar Informasi Ketenagakerjaan dan loket informasi 225 buku

C. BIDANG LATIHAN DAN PRODUKTIVITAS

Tugas utama bidang Latihan dan Produktivitas melaksanakan pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja.

Kegiatan selama Tahun Dinas 2000 yang telah dicapai adalah sebagai berikut

1. KEGIATAN RUTIN

Dana pendukung kegiatan rutin Bidang Pelatihan dan Produktivitas pada Tahun Dinas 2000 sebesar Rp.2.200.000. Dana tersebut untuk menunjang kegiatan pembinaan, penyuluhan, pengawasan ketenagakerjaan di perusahaan/organisasi/lembaga, instansi pemerintah/swasta dan perusahaan sebanyak 64 kali kunjungan.

Dalam melaksanakan kegiatan Bidang Pelatihan dan Produktivitas ditangani oleh 4 (empat) Seksi.

Hasil kegiatan :

- a. Pembinaan instruktur dengan mengaktifkan Kelompok Kerja (POKJA) untuk dimasing-masing kejuruan 2 kali pertemuan.
- b. Melaksanakan mobilitas instruktur dalam SKB pihak ke III kejuruan elektro dan sepeda motor.
- c. Penilaian angka kredit instruktur BLK/ KKK, BPPD.
 - Semester I : 455 bendel
 - Semester II : 457 bendel
- d. Pemberian ijin tetap lembaga latihan swasta + LLP = 19 buah
- e. Pemberian status akreditasi pada LLS dan LLP : 23 LLK
- f. Pelaksanaan U/K dan sertifikasi (TKI ke Luar Negeri) : 11.422 orang.
- g. Pelaksanaan U/K dan sertifikasi Pekerja perusahaan: 150 orang.

- h. Pelaksanaan U/K dan sertifikasi lulusan LLS/LLK : 17.586 orang.
- i. Penempatan peserta pelatihan di Perusahaan/Instansi Pemerintahan/Mandiri : 11.602 orang.

Dengan rincian sebagai berikut :

Penempatan TKI ke Luar Negeri : 11.422 orang.
 Penempatan Perusahaan : 159 orang.
 Penempatan Pemerintah : 3 orang.
 Penempatan Mandiri : 18 orang.

- j. Memberikan penjelasan kepada masyarakat. Tentang prosedur magang. Informasi kemas media elektronik, media masa dan brosur, leaflet. Memberikan sosialisasi pemagangan di Hotel Simpang Surabaya 100 orang dengan peserta dari perusahaan.

- k. Jumlah peserta pemagangan dari perusahaan tempat magang

No.	Kegiatan	Peserta (Org)	Perusahaan	Penpt (orang)
1.	Magang Standart	576	85	35
2.	Magang non Standart oleh LLKI, LLKUKM, LLS, LLP	1.769	1.560	125
3.	Magang ke Jepang Depnaker + IMM	158	158	158
	Magang ke Jepang Depnaker + IMM	136	136	-

- l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemasaran program pengembangan produktivitas dengan sasaran: Insatansi Pemerintah, BLK, KKK dan Perusahaan.
- m. Menyiapkan bahan-bahan pembinaan produktivitas tenaga kerja untuk :
- Penyuluhan UP 3.
 - Pelatihan Manajemen Kewirausahaan di Pondok Pesantren
 - Pembinaan lembaga latihan

2. KEGIATAN PEMBANGUNAN

Kegiatan pembangunan/proyek ada 2 (dua) lokasi proyek, di kanwil merupakan proyek yang tugasnya melaksanakan kegiatan tersendiri disamping kegiatan lain yang sifatnya koordinasi di Bagian Proyek yang berlokasi kegiatan di BLK/KLK.
 Khusus kegiatan proyek Peningkatan ketrampilan tenaga kerja Jawa Timur sebesar Rp.3.078.915.000,00

a. Hasil Kegiatan Proyek di Kanwil

- Identifikasi kebutuhan latihan instruktur dalam rangka untuk memperoleh data kuantitas dan kualitas dalam upaya perencanaan, pengembangan program dan kemampuan, mentransfer informasi, mengelola latihan dan kemampuan dalam spesialisasinya.
- Identifikasi kebutuhan latihan dalam rangka mendukung kelancaran pembangunan nasional (disentralisasi program latihan dan produktivitas guna meningkatkan efektivitas, efisiensi dan integrasi program). Kegiatan-kegiatan pengembangan pelatihan dan identifikasi kebutuhan latihan di daerah).
- Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional diikuti 19 orang
4 orang dari Jawa Timur
15 orang dari luar Jawa Timur
- Pelatihan Kewirausahaan
Program penerapan manajemen terpadu bagi UKM dan menjaga kelangsungan usaha UKM, perluasan dan peningkatan kesempatan kerja baru.
- Pengembangan kelembagaan dengan peserta 20 orang, tujuannya untuk peningkatan pengelola latihan swasta/perusahaan.
- Bimbingan dan penyuluhan tenaga pelatih diikuti 20 orang untuk meningkatkan kemampuan melatih para instruktur dan meningkatkan kemampuan penyusunan dan pengembangan program latihan dan sebagainya.

b. Kegiatan Bagian Proyek

Lokasi kegiatan ada di 16 BLK/KLK seluruh Jawa Timur dengan target latihan instruktur dan MTU 3.026 orang dan setelah mengikuti latihan lulus MTU 2.206 orang, institusional 793 orang

D. BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KERJA

I. KEGIATAN RUTIN

a. Informasi Bursa Kerja Terpadu

Kegiatan rutin Bidang Pentakerja adalah, penempatan tenaga kerja dan pemenuhan lowongan melalui prosedur Antar Kerja Umum, Antar Kerja Khusus dan Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing :

1) Pencari Kerja

• Pencaker yang belum ditempatkan tahun lalu	:	215.354 orang
• Pencaker baru yang terdaftar tahun ini	:	101.920 orang
• Pencaker yang ditempatkan tahun ini	:	53.132 orang
• Pencaker yang dihapuskan tahun ini	:	63.450 orang
• Pencaker yang belum ditempatkan tahun ini	:	196.399 orang
• Sisa lowongan yang belum dipenuhi tahun ini	:	20.002 orang

2) Bursan Kerja Khusus (BKK)

Jumlah BKK yang telah mendapat ijin sampai dengan akhir tahun 2000 sebanyak 85 unit, dengan rincian sebagai berikut :

o Disatuan Sekolah Kejuruan	68 unit
o Disatuan Perguruan Tinggi	3 unit
o Disatuan LLS	9 unit
o Disatuan BLK/KLK	5 unit

Hasil Antar Kerja BKK :

o Pencari Kerja yang terdaftar	6.862 orang
o Lowongan yang terdaftar	1.356 orang
o Penempatan pencari kerja	865 orang

3) Lembaga Pelayanan dan Penempatan Swasta (LPPS)

Dalam tahun 2000 LPPS yang telah diberi ijin sebanyak 10 perusahaan/ yayasan dengan lokasi Surabaya 4 perusahaan, Sidoarjo 1 perusahaan dan Probolinggo 1 perusahaan.

4) Perusahaan Jasa Tenaga Kerja (PJTKI)

Dalam tahun 2000 jumlah PJTKI dan Perwada yang beroperasi di Jawa Timur dapat dirinci sebagai berikut :

PJTKI	42 perusahaan
Perwada	124 perusahaan

5) Penggunaan Tenaga Kerja Asing

a) TKWNAP

• Baru	27	orang
• Perpanjangan	191	orang
• Pindah Jabatan	-	orang
Jumlah	218	orang

b) TKA Pendetang

• Baru	-	orang
• Perpanjangan	11	orang
• Pindah Jabatan	1	orang
Jumlah	12	orang

6) Penyaluran Tenaga Kerja

• A K L	:	11.658 orang
• A K A D	:	8.035 orang
• A K A N	:	24.224 orang
• P T K P	:	- orang

7) Job Market Fair di 4 bursa kerja khusus.

8) Penyuluhan dan bimbingan jabatan selama tahun 2000 sebanyak 27.118 orang

9) Perijinan Praktek Psikologi

Selama tahun 2000 telah dikeluarkan ijin praktek psikologi sebanyak 26 orang, pemegang ijin praktek psikologi sampai akhir tahun 2000 sebanyak 76 orang.

2 KEGIATAN PEMBANGUNAN

Proyek Perluasan Lapangan Kerja dan Pengurangan Pengangguran (PLKPP) di Jawa Timur Tahun Dinas 2000, sasaran proyek antara lain pelayanan penempatan tenaga kerja pengembangan dan perluasan kerja, penyediaan informasi dan pembinaan kelembagaan. Dana yang tersedia sebesar Rp 3.056.825.000,-

1 Pelayanan Penempatan tenaga kerja, meliputi :

o Penempatan tenaga kerja melalui AKL	:	2.000 orang
o Penempatan Tenaga Kerja melalui AKAD	:	6.250 orang
o Penempatan Tenaga Kerja Penca	:	40 orang
o Pembinaan Pengguna TKWNAP	:	60 orang

2 Pengembangan dan Perluasan Kerja, meliputi :

o Pembentukan wirausaha melalui TKPMP dan TKMP	:	160 orang
o Penerapan Teknologi Padat Karya (TPK)	:	552 orang
o Perluasan Kerja Sistem Padata Karya (PKSPK)	:	190 orang
o Pembudayaan Tenaga Kerja Wanita melalui Pola Grammen Bank	:	1.250 orang

3 Penyediaan Informasi dan Pembinaan Kelembagaan, meliputi :

o Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	:	1.500 orang
o Informasi Pasar Kerja	:	765 orang
o Penyuluhan dan Bimtek Analisa Jabatan	:	15 orang
o Pembinaan Bursa Kerja Khusus	:	30 orang

E. BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN SYARAT KERJA

3. KEGIATAN RUTIN

a. Sarana Hubungan Industrial Pancasila

1) Serikat Pekerja sampai akhir tahun dinas 2000, sebagai berikut :

• Jumlah SPTP terdaftar di Kandep	:	2.115 perusahaan
• Jumlah SPTP terdaftar di Kanwil	:	12 perusahaan
• Jumlah gabungan SP terdaftar di Kandep	:	112 perusahaan
• Jumlah gabungan SP terdaftar di Kanwil	:	16 perusahaan
• Jumlah Federasi terdaftar di Kandep	:	37 perusahaan
• Jumlah Federasi terdaftar di Kanwil	:	9 perusahaan
• Peraturan Perusahaan (PP)	:	334 perusahaan
• Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)	:	17 perusahaan
• Koperasi Karyawan	:	3.070 perusahaan
• LKS Bipartit	:	1.666 perusahaan

2) Hubungan Industrial

Dalam melaksanakan penyuluhan pemasyarakatan/pendidikan HIP :

• Penyuluhan HIP Tingkat Dasar	:	720 orang
• HIP Tingkat Lanjutan 2 angkatan	:	60 orang

3) Kegiatan LK Tripartit

Kegiatan Tripartit di Jawa Timur, adalah sebagai berikut :

❖ Kegiatan rapat Sekretariat

- Membahas pelaksanaan sosialisasi Forum Komunikasi tripartite, kemungkinan terbentuknya LK Tripartit sektoral dan membahas penyempurnaan keanggotaan LK Tripartit Propinsi Jawa Timur.
- Evaluasi pelaksanaan Tripartit sektoral.
- Antisipasi pelaksanaan THR 2000.

❖ Kegiatan Sidang Pleno dilaksanakan 4 kali dalam satu tahun.

❖ Kegiatan Operasional

- Mengadakan pembinaan pada LK Tripartit Tingkat II yang dirasa masih kurang berfungsi.
- Menyelenggarakan sosialisasi dalam rangka pemahaman konvensi dasar ILO mengenai ketenagakerjaan.

4) Persyaratan Kerja

Kegiatan pengawasan dan pengurusan, pengumpulan data dan penelitian Kebutuhan Hidup Minimum (KHM).

5) Pengupahan

Sejak dikeluarkan SK Menaker RI Nomor Kep. 150/Men/2000 tentang Upah Minimum Regional telah dilakukan sosialisasi :

- ❖ Sosialisasi di wilayah 7 Pembantu Gubernur dengan mengundang anggota Komisi Tingkat II dan perusahaan dengan pelaksanaan tersebut telah diikuti 30 orang dari Kandep/Disnaker.
- ❖ Pemantauan
 - Pemantauan oleh Disnaker Tingkat II sebanyak 600 perusahaan
 - Pemantauan oleh Komisi Pengupahan sebanyak 6 perusahaan.
 - Pemantauan oleh Kandepnaker sebanyak 3 perusahaan
- ❖ Sebanyak 9 perusahaan yang mengajukan penangguhan pelaksanaan UMR:
 - yang diijinkan sebanyak : 6 perusahaan
 - yang ditolak sebanyak : 3 perusahaan

6) Perbandingan UMR dan KHM dapat dijelaskan sebagai berikut

Rata-rata UMR : Rp.236.000,00

Rata-rata KHM : Rp 243.701,20

Prosentase : 92,48 %

7) Perselisihan Hubungan Industrial

- ❖ Penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial (UU. No.22/1957). Sisa perkara tahun 1999 sebanyak 34 kasus (masih dalam proses), ditambah perkara yang masuk tahun 2000 sebanyak 63 kasus, sehingga jumlah perkara 97 kasus. Perkara yang dapat diselesaikan sebanyak 51 kasus, dengan rincian 18 kasus diselesaikan melalui PB, sedangkan yang sisanya 33 kasus diteruskan ke P4D/P4P untuk penyelesaiannya. Dengan demikian sisa perkara yang belum diselesaikan sampai akhir tahun 2000 sebanyak 46 kasus (masih dalam proses).
- ❖ Penyelesaian Kasus Pemutusan Hubungan Kerja (UU. No. 12/1964). Sisa perkara, tahun 1999 sebanyak 338 kasus (masih dalam proses), ditambah perkara yang masuk tahun 2000 sebanyak 594 kasus, sehingga jumlah perkara 932 kasus. Perkara yang dapat diselesaikan sebanyak 188 kasus, dengan rincian 140 kasus diselesaikan melalui Bipartit, sedangkan yang sisanya 48 kasus diteruskan ke P4D/P4P untuk penyelesaiannya. Dengan demikian sisa perkara yang belum diselesaikan sampai akhir tahun 2000 sebanyak 744 kasus.
- ❖ Penanganan unjukrasa/pemogokan
Jumlah kasus unjukrasa/pemogokan selama tahun 2000 sebanyak 138 kasus, melibatkan 81.405 orang pekerja dan 2.172.801 jam kerja yang hilang. Penyebab unjukrasa/pemogokan adalah :
 - Tuntutan Normatif : 95 kasus
 - Tuntutan Non Normatif : 215 kasus

- ❖ Penangan Kasus PO Box 500
Pengaduan masyarakat melalui PO Box 5000 yang masuk selama tahun 2000 sebanyak 5 perkara dan yang telah diselesaikan sebanyak 4 perusahaan, sedang satu sisanya masih dalam proses yaitu PT. Centrum Pasuruan
- ❖ Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat melalui KOMNAS HAM
Kasus yang masuk sebanyak 37 kasus dan dapat diselesaikan 36 kasus, sisanya satu kasus masih dalam proses yaitu PT. Sari Tani Nusantara, Gondanglegi – Malang
- ❖ Pendataan Kerawanan Perusahaan
Dalam rangka menyusun peta kerawanan perusahaan terhadap keresahan, tim deteksi dini kaitannya keresahan hubungan industrial. Dari data yang ada baru 10.325 perusahaan yang telah dibuat data tingkat kerawanan dari jumlah 27.036 perusahaan, adalah sebagai berikut :

- Perusahaan rawan	:	909 perusahaan
- Perusahaan setengah rawan	:	4.318 perusahaan
- Perusahaan mantab	:	5.098 perusahaan

4 KEGIATAN PEMBANGUNAN

Dalam tahun dinas 2000 Bidang Hubinsyaker melalui proyek PHIPTK didukung dana sebesar Rp.434.998.000,-

Adapun hasil kegiatan, sebagai berikut :

- a Pengembangan Forum Dialogis Pekerja dan LSM dan Pengusaha, yaitu :
menunjang, menjalankan, menyamakan persepsi ketenagakerjaan, sehingga menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan dinamis.
- b Pembinaan dan Pembentukan LK Bipartit, kegiatan pembinaan dan pembentukan LK Bipartit melalui penyuluhan dan bimbingan perusahaan pada daerah meliputi 8 Kandeptaker di Jawa Timur. Dan hasil penyuluhan tersebut telah terbentuk LK Bipartit di 18 perusahaan.
- c Peningkatan mekanisme kerja LK Tripartit Tingkat I dan Tingkat II, kegiatan dilaksanakan oleh LK Tripartit Tingkat I dan Tingkat II.
Tripartit Tingkat I Jawa Timur
 - Membahas pelaksanaan sosialisasi komunikasi Tripartit.
 - Membahas kemungkinan terbentuknya LK Tripartit.
 - Membahas penyempurnaan keanggotaan LK Tripartit Jawa Timur
 - Evaluasi Tripartit Jawa Timur tahun 2000 dalam rangka menyongsong otonomi daerah tahun 2001.
 - Pelaksanaan persiapan Tripartit sektoral.
 - Antisipasi pelaksanaan THR 2000.
 - Antisipasi dampak upah minimum regional 2001.

Sedangkan kegiatan di Tingkat II hasil yang dicapai adalah tercapainya kesepakatan kerja bersama Forum Komunikasi Tripartit Indonesia.

- d. Pembinaan organisasi pekerja dan pengusaha, kegiatan pembinaan dengan peserta 20 perusahaan yang sudah ada serikat pekerja pada wilayah Malang, Surabaya, Gresik dan Sidoarjo.
- e. Pembahasan dan penetapan UMR/UMSR 2001, telah dilaksanakan penyusunan usulan UMR/UMSR dan pembahasan permohonan ijin penangguhan pembayaran UMR.
- f. Pengkajian dan pengembangan sistem pengupahan kebutuhan hidup /IHK. Kegiatan pengumpulan data pengupahan dan KHM sebanyak 240 perusahaan.
- g. Sosialisasi UMR, untuk menyamakan persepsi tentang UMR di 24 daerah Tingkat II.
- h. Penetapan dan Pengembangan sistem Deteksi Dini Sektorial
 - Mengadakan pembinaan, penyuluhan dan pemantauan oleh Tim Deteksi Dini dengan koordinasi dengan dinas/instansi terkait ke perusahaan yang di klasifikasi rawan terhadap masalah ketenagakerjaan di 5 Kabupaten/Kota. Dari 150 perusahaan yang disurvei dapat diketahui tingkat kerawanan perusahaan, sebagai berikut

Rawan (Merah)	19,33 % - 29 perusahaan
Setengah Rawan (Kuning)	41,33 % - 62 perusahaan
Rawan relatif mantap (Hijau)	39,34 % - 59 perusahaan
 - Penerapan sistim deteksi dini Dati II secara Bipartit dan berjenjang. Pembinaan kepada 55 perusahaan rawan ketenagakerjaan oleh Tim Deteksi Dini Dati II di 5 Kandeptaker Blitar, Banyuwangi, Tulungagung, Jombang dan Probolinggo masing-masing 11 perusahaan.

Hal yang dicapai dapat diketahui tingkat kerawanan sebagai berikut :

Rawan (Merah)	12,73 % - 7 perusahaan
Setengah Rawan (Kuning)	50,90 % - 28 perusahaan
Rawan relatif mantap (Hijau)	36,37 % - 20 perusahaan
- i. Forum Komunikasi, koordinasi Pegawai Perantara, Panitera/Panitia P4D dan Pegawai Pengawas.
- j. Penyusunan dan penyebaran informasi
 - Penyuluhan HIP di 24 Kandept/Kadis masing-masing 30 orang.
 - Penmas HIP bagi pekerja dan pengusaha tingkat lanjutan sektor dilaksanakan dengan peserta 60 orang dari 10 Kandeptaker.
 - Penmas HIP bagi pengurus LK Bipartit, penyuluhan dan pemasyarakatan HIP dengan peserta 30 orang dari pengurus LK Bipartit.

- k. Penanggulangan pemogokan/unjukrasa telah dilaksanakan penyelesaian pemogokan/unjukrasa di perusahaan sebanyak 45 kasus di 7 Kandep dan Kanwil. Dari hasil penyelesaian unjukrasa tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam tuntutan :
- Tuntutan normatif : 5 kasus
 - Tuntutan non normative : 40 kasus
- l. Pengembangan informasi melalui jalur kasus, bila kasus tahun dinas 2000 di 3 daerah Dati II kabupaten Tulungagung, Banyuwangi dan Jember.
- m. Pengawasan/Supervisi
- Evaluasi dan analisa pengembangan LK Bipartit dan serikat pekerja di 20 perusahaan
 - Evaluasi pemogokan/unjukrasa, dari hasil penyelesaian pemogokan dan unjukrasa di Kanwil Depnaker, Kandep Mojokerto, Gresik, Pasuruan dan Malang sebanyak 45 kasus dengan 14.756 orang tenaga kerja yang terlibat dan 251 jam kerja yang hilang

F. BIDANG PENGAWASAN DAN KESEHATAN KESELAMATAN KERJA JAWA TIMUR

b. KEGIATAN RUTIN

- a. Jumlah perusahaan di Jawa Timur Tahun Dinas 2000 berdasarkan UU. No. 7 tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan sebanyak 27.036 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 1.800.979 orang tenaga kerja, dengan rincian sebagai berikut :
- PMDN : 2.486 perusahaan
 - PMA : 963 perusahaan
 - Perorangan : 3.741 perusahaan
 - Lain-lain : 19.846 perusahaan

Sedangkan jumlah tenaga kerja sebanyak 1.818.837 orang, dengan rincian sebagai berikut :

- WNI Laki-laki : 1.175.001 orang
- WNI Perempuan : 642.942 orang
- WNA Laki-laki : 1.687 orang
- WNA Perempuan : 207 orang

Bila jumlah tenaga kerja dirinci menurut klasifikasi perusahaan, sebagai berikut :

- < 10 orang : 9.872 perusahaan
- 10 – 24 orang : 7.281 perusahaan
- 25 – 49 orang : 3.525 perusahaan
- 50 – 100 orang : 2.366 perusahaan
- > 100 orang : 3.609 perusahaan

Jumlah perusahaan yang mempekerjakan TKWNAP sebanyak 5.281 perusahaan dan menurut 9 lapangan usaha sebanyak 5.281 orang. Sedangkan dari jumlah tenaga kerja warga negara asing yang bekerja di Jawa Timur berasal dari 18 negara dan negara yang paling besar adalah Taiwan 938 orang, Korea Selatan 871 orang dan Jepang 794 orang.

Posisi pemberian/pencabutan IKTA, adalah sebagai berikut :

- Keadaan akhir tahun lalu : 5.229 orang.
- IKTA yang diterbitkan : 61 orang
- IKTA yang habis masa berlakunya : 9 orang

b. Jumlah pesawat/peralatan se Jawa Timur :

- Pesawat Uap/Bejana Tekan : 199 buah
- Mesin Diesel : 133 buah
- Listrik : 62 buah
- Pesawat angkat/angkut : 406 buah
- Penyalur petir : 74 buah
- Lift : 20 buah
- Bejana tekan : 454 buah

Potensi Pegawai Pengawas sebanyak 155 orang

c. Pengawasan dan Pemeriksaan

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas sebanyak 8.266 perusahaan, apabila dibandingkan dengan jumlah Pegawai Pengawas yang ada sekarang 125 orang, maka hasil pemeriksaan setiap Pegawai Pengawas adalah 5 perusahaan/bulan.

Sedangkan jika hal ini dikaitkan dengan target yang dibebankan yaitu 8 perusahaan/Pegawai Pengawas/Bulan, perolehan pemeriksaan baru mencapai 75 %. Target yang dibebankan oleh Depnaker Pusat yaitu 12.000 perusahaan, maka pemeriksaan mencapai 70 %

d. Pelanggaran

Didalam melaksanakan pengawasan di perusahaan ditemukan 8.266 pelanggaran yang terdiri dari pelanggaran Norma Umum 6.761 kasus dan Norma Khusus 4.451 kasus

e. Pembinaan

Dengan banyaknya jumlah pelanggaran sebagaimana tersebut diatas, langkah kegiatan selanjutnya perlu adanya pembinaan yang meliputi antara lain :

1) Pembinaan terhadap pengusaha

Dalam Tahun Dinas 2000 telah dilakukan pembinaan terhadap 600 perusahaan. Adapun materi yang diberikan antara lain UMR, Norma Kerja Nakerwan, Jamsostek, dan Keselamatan Kerja.

2) Pembinaan terhadap tenaga kerja

Sedangkan pembinaan terhadap tenaga kerja mencapai 180 orang tenaga kerja, materi yang disampaikan adalah UMR, Norma Kerja, Jamsostek, Kebakaran, dan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja.

3) Disamping pembinaan terhadap extern (pengusaha dan pekerja) pembinaan intern dalam hal ini Kandepnaker, materi yang diberikan :

- Mekanisme surat menyurat yang belum tertib.
- Nota Pemeriksaan tidak dibuat setelah selesai pemeriksaan.
- Hasil pelaporan pemeriksaan tidak sesuai dengan rencana yang dibuat.
- Tidak semua kegiatan dilaporkan ke Kanwil secara fungsional.

f. Panitia Pembina Keselamatan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Kerja (P2K3)

Tujuan akhir daripada pengawasan adalah terciptanya karyawan berusaha dan bekerja bagi pengusaha dengan berbagai cara dilaksanakan, untuk tujuan tersebut diatas yang antara lain pembinaan dan usaha lain membantu intuisi P2K3.

Di Jawa Timur dalam tahun dinas 2000 pada 3.609 perusahaan telah terbentuk 2.814 P2K3. Apabila dibandingkan dengan tahun yang lalu yang berjumlah 2.729, maka terdapat kenaikan sebanyak 85 P2K3 atau 3,11 % dan pada tahun dinas 2000 jumlah perusahaan yang nihil kecelakaan sebanyak 17 perusahaan.

g. Fasilitas Pelayanan Kesehatan/Deteksi perusahaan, jumlah perusahaan yang mempunyai fasilitas pelayanan kesehatan se Jawa Timur sampai dengan Desember 2000 sebanyak 74 perusahaan, jumlah pelayanan kesehatan kerja yang sudah mendapatkan dan masih berlaku sesuai dengan UU No. 1/1970 sebanyak 74 perusahaan, ada kenaikan 15 perusahaan atau 25,42 % dan Dokter Pemeriksa Kesehatan 74 orang.

h. Kepesertaan Jamsostek

- Kepesertaan

Sampai akhir tahun dinas 2000 jumlah perusahaan yang mengikuti Jamsostek sebanyak 217.104 perusahaan dari jumlah 27.036 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 2.155.034 orang.

- Kecelakaan Kerja
Selama tahun dinas 2000 jumlah kecelakaan sebanyak 8.894 kasus, dengan rincian sebagai berikut :

1) Luka ringan	: 7.081 orang
2) STMB	: 1.493 orang
3) Luka berat/cacat	: 67 orang
4) Meninggal dunia	: 253 orang

- Jaminan Santunan Kecelakaan Kerja
Jumlah jaminan atau santunan yang diberikan kepada korban kecelakaan kerja dari PT Jamsostek sebagai berikut :

• Jaminan Kecelakaan Kerja	: Rp. 16.192.292.534,00
• Jaminan Hari Tua	: Rp. 69.195.215.052,00
• Jaminan Kematian	: Rp. 4.092.145.200,00

- i. Pengembangan dan Pengkajian
Pengkajian yang dilaksanakan oleh Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, adalah sebagai berikut :

- 1) Pengkajian, permohonan ijin penyimpangan waktu kerja sebanyak 273 perusahaan dengan melibatkan tenaga kerja sebanyak 2.415 orang
- 2) Pengkajian perusahaan pelayanan kesehatan kerja 15 perusahaan
- 3) Pengkajian rekomendasi pemakaian pestisida terbatas 12 perusahaan
- 4) Pengkajian pengecekan P2K3 sejumlah 85 perusahaan
- 5) Lokakarya Dialog Interaktif
Dalam rangka meningkatkan wawasan dan pembinaan profesi telah dilakukan dialog interaktif dengan peserta Pegawai Pengawas, DPRD Tingkat I Jawa Timur, PT Jamsostek, pakar hukum dan perguruan tinggi Unair, dan bimbingan teknis dan koordinasi PPNS dengan aparat penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri serta Pegawai Pengawas
- 6) Pembekalan CTKI ke luar negeri mengenai penjelasan perjanjian kerja dengan pengguna jasa.

2 KEGIATAN PEMBANGUNAN

Bidang Pengawasan dalam tahun dinas 2000 memperoleh Proyek Pengembangan Kondisi Lingkungan Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja Jawa Timur tersedia dana sebesar Rp. 130.499.000,-

Dengan hasil kegiatan, sebagai berikut :

- a. Pelatihan calon Ahli Keselamatan Kerja
- b. Penyuluhan dan pembentukan kader penyebaran norma kerja.
- c. Forum Komunikasi, konsultan pengolahan data base wajib lapor ketenagakerjaan 24 paket.
- d. Sosialisasi pola pejabat fungsional.
- e. Peningkatan manajemen pengawasan.
- f. Pelatihan K3 bagi pengelola gedung bertingkat untuk jasa pelayanan umum 1 paket.
- g. Penyuluhan bagi perusahaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja
- h. Penyuluhan dalam rangka peningkatan peran dan fungsi P2K3.
- i. Penyidikan/pembuatan BAP 10 buku
- j. Peningkatan JPK Jamsostek pelaksanaan di 60 perusahaan.
- k. Pemeriksaan kerja malam wanita, kasus pelanggaran norma kerja dan pengawasan TKA, UMR, P4D dan TK 650 perusahaan.

G. BALAI HIPERKES DAN KESEHATAN KERJA JAWA TIMUR

1. KEGIATAN RUTIN

- a. Mengatur tentang kepegawaian yang menyangkut cuti, mutasi, usulan kenaikan pangkat, usulan gaji berkala dan lain-lain
- b. Mengatur alur surat kaitannya pelayanan masyarakat dan instansi.
- c. Pemeliharaan prasarana fisik dan peralatan laboratorium.
- d. Mengadakan pelayanan masyarakat dengan dunia industri dan dunia mahasiswa
- e. Perpustakaan memperbanyak koleksi buku-buku perpustakaan khususnya buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah ketenagakerjaan. Diharapkan fungsi dan peran perpustakaan tersebut menarik bagi masyarakat umum dan dunia universitas dan mahasiswa.
- f. Mengadakan pelatihan dan keselamatan kerja bagi teknisi perusahaan sebanyak 28 orang.
- g. Pelatihan untuk sektor mebelair sebanyak 30 orang, pelatihan di sektor perkantoran 30 orang.
- h. Pelatihan P2K3 diikuti 30 orang dan pelatihan bagi Satria Utama Group 10 angkatan.
- i. Pelatihan Hiperkes dan KK bagi dokter PTT maupun perusahaan.

MENGADAKAN MONITORING LINGKUNGAN KERJA

- a. Faktor Fisik di sektor industri pengolahan sebanyak 10 perusahaan.
- b. Faktor Kimia di sektor industri pengolahan sebanyak 4 perusahaan.
- c. Ergonomi dan gizi di sektor industri pengolahan sebanyak 3 perusahaan.

PENDAYAGUNAAN FASILITAS BALAI HIPERKES

- Pengukuran udara ambien di sektor industri pengolahan 7 perusahaan listrik, 1 perusahaan sektor industri.
- Pengukuran emisi (cerobong) sektor industri pengolahan 3 perusahaan dan sektor industri listrik 2 perusahaan.
- Pengukuran lingkungan kerja sektor industri pengolahan 1 perusahaan, sektor industri listrik 1 perusahaan.

BANTUAN TEKNIK

- pengukuran ambien sektor industri pengolahan 118 perusahaan, dan sektor industri listrik, air dan gas 2 perusahaan.
- Pengukuran emisi cerobong di sektor industri pengolahan 86 perusahaan, sektor industri listrik, air dan gas 1 perusahaan.
- Pengukuran lingkungan kerja di sektor industri pengolahan pada 76 perusahaan.

LAIN-LAIN

- Pemeriksaan audiometrik 2 orang, kesehatan kerja 332 orang mengalami kelainan 65 orang.
- Pemeriksaan Visus 278 orang, Foto torak 278 orang, spirometri 387 orang, SGPT 278 orang kelainan 278 orang.
- Kunjungan dan pengamatan lingkungan kerja di beberapa perusahaan di Surabaya dan sekitarnya.
- Kegiatan-kegiatan mengajar di universitas dan perusahaan :
 - PT. Unilever, Universitas Wijaya Kusuma, AKL Magetan dan ITS.
 - Memberikan ceramah Produktivitas Rumah Lingkungan di BPPD Jawa Timur.

MEMBANTU MAHASISWA PADA PENGUKURAN/PEMERIKSAAN

- Kelelahan Umum sebanyak 25 orang.
- Iklim kerja sebanyak 49 lokasi.
- Penerangan sebanyak 35 lokasi.
- P_b dalam darah sebanyak 43 orang.
- Pengukuran kadar debu sebanyak 20 lokasi.
- Audiometri sebanyak 1 orang.
- C_0H_8 dalam darah sebanyak 23 orang.
- Spirometri sebanyak 151 orang.
- Pengukuran gas NO_x dan Gas O_3 sebanyak 2 lokasi.
- Pengukuran kadar debu sebanyak 4 lokasi.
- Seminar sehari asosiasi Hiperkes dan Keselamatan Kerja di Hotel IBIS dengan tema Sertifikasi dan Konsultasi K3.

2. KEGIATAN PEMBANGUNAN/PROYEK

Bagian Proyek Pengembangan Hygiene Kesehatan dan Keselamatan Kerja Jatim Tahun Dinas 2000 didukung dana APBN sebesar Rp.65.250.000,-

Hasil Kegiatan sebagai berikut :

1 Pengukuran dan Pemeriksaan di Sektor Industri Pengolahan :

• Iklim Kerja	5	perusahaan
• Kadar Debu	3	perusahaan
• Benzin	3	perusahaan
• Kebisingan	5	perusahaan
• Penerangan	5	perusahaan
• Getaran Mesin	5	perusahaan

2 Penyebaran Informasi :

- Penyuluhan Hiperkes dan Keselamatan Kerja bagi Supervisor sebanyak 30 orang
- Penyuluhan Hiperkes dan Keselamatan Kerja paramedis sebanyak 30 orang

H. KEPANITERAAN P4D JAWA TIMUR

1 KEGIATAN RUTIN

a Penyelesaian Perkara PHI/PHK

- Perkara Perselisihan Industrial menurut UU No. 22 Tahun 1957

Sisa Perkara akhir 1999	8	perkara
Perkara yang masuk	67	perkara
Perkara yang diselesaikan	60	perkara
Sisa Perkara	15	perkara

- Perkara Perselisihan Industrial menurut UU No. 12 Tahun 1964

Sisa Perkara akhir Desember 1999	119	perkara	155	tk
Perkara yang masuk	571	perkara	718	tk
Perkara yang diselesaikan	584	perkara	734	tk
Sisa Perkara	106	perkara	139	tk

b. Alasan Pemutusan Hubungan Kerja

• Manajemen	43 perkara	81 orang
• Indisipliner	305 perkara	346 orang
• Kontrak selesai	8 perkara	15 orang
• Lain-lain	228 perkara	292 orang

c. Perkara yang dimintakan Banding/Pemeriksaan Ulang

PHI

Oleh pihak pengusaha	7 perkara
Oleh pihak pekerja	9 perkara
Oleh pihak pengusaha & pekerja	1 perkara

PHK

Oleh pihak pengusaha	107 perkara
Oleh pihak pekerja	50 perkara
Oleh pihak pengusaha & pekerja	5 perkara

2. KEGIATAN PEMBANGUNAN/PROYEK

Kegiatan pembangunan/proyek PHIPTK P4D Jawa Timur dana APBN yang tersedia sebesar Rp 65.250.000,- dengan hasil kegiatan sebagai berikut :

- Penyebaran Informasi 1 paket
- Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi 500 kasus 11 kali.

I. BALAI PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA (BP2TKI)

1. KEGIATAN RUTIN

a. Penyerapan/Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri

Penempatan TKI di Luar Negeri melalui program BP2TKI Tahun Dinas 2000 tercatat sebanyak 24.224 orang yang terdiri dari laki-laki 1.774 orang, sedang tenaga kerja wanita 22.450 orang.

Dibandingkan TA. 1998/1999 yang sebanyak 39.849 orang, berarti ada penurunan 15.625 orang atau 39,21 %.

Dalam tahun dinas 2000 jumlah remiten sebesar 94.201.800 dollar, sedang pada tahun 1999/2000 sebesar 1.673.658 dollar, berarti ada kenaikan 92.628.142 dollar atau 99,22 %.

Dilihat dari jenis jabatan pengiriman ke Luar Negeri masih didominasi oleh jabatan pembantu rumah tangga hampir 23,47 % dari seluruh jabatan yang diisi. Sedangkan negara tujuan yang paling besar diminati tidak lagi ke Malaysia, tetapi ke Hongkong, hampir 45,48 % dari jumlah penempatan. Untuk Daerah Tingkat II di Jawa Timur pemasok CTKI terbesar dari Kandeptaker Malang dan kedua Kandeptaker Ponorogo.

b. Lembaga yang menangani TKI di Jawa Timur

• PJTKI	:	43	perusahaan
• Perwakilan PJTKI	:	124	perusahaan
• BLKLN	:	8	perusahaan

2. KEGIATAN PEMBANGUNAN

Kegiatan untuk BP2TKI di Jawa Timur tersedia dana APBN sebesar Rp. 60.000.000,- dan hasil kegiatan meliputi antara lain

- Pendaftaran dan seleksi Calon TKI, kegiatan dimaksud membantu terselenggaranya pendaftaran dan seleksi yang tepat dan cepat.
- Penyiapan pemberangkatan calon TKI Jawa Timur.
- Sosialisasi program penempatan TKI meliputi Daerah Tingkat II dan Kecamatan di Jawa Timur.

J. BALAI PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS DAERAH JAWA TIMUR

1. KEGIATAN RUTIN

Dana kegiatan rutin untuk BPPD Jawa Timur tahun dinas 2000 sebesar Rp 279.936.000. Dana tersebut disamping untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan belanja perjalanan juga untuk membayar pelatihan dengan sasaran para pengusaha kecil sebanyak 5 kelompok masing-masing kelompok 25 orang, jadi jumlah keseluruhan sebanyak 125 orang.

2. KEGIATAN PEMBANGUNAN

Jumlah dana yang tersedia lewat APBN pada tahun dinas 2000 sebesar Rp 239.240.000,- dengan hasil kegiatan sebagai berikut :

• Pendidikan dan Pelatihan Tehnis Fungsional	:	9 kegiatan
• Pengembangan Kelembagaan	:	7 kegiatan
• Penyuluhan dan penyebaran informasi	:	4 kegiatan

Disamping mendapat biaya APBN, kegiatan pada BPPD mendapat dana APBD sebesar Rp 35.000.000,-

Biaya tersebut untuk menunjang kegiatan antara lain untuk belanja pegawai, belanja barang, biaya pemeliharaan dan perjalanan.

Disamping itu untuk biaya pelatihan bagi pengusaha kecil sebanyak 4 kelompok dengan jumlah setiap kelompok 25 orang.

Untuk lokasi kegiatan di kabupaten Kediri, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo

DISPERPUSIP JATIM

BAB III

MASALAH/HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan Rutin/Pembangunan Tahun Dinas 2000 di jajaran Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur masih banyak menghadapi hambatan/permasalahan.

Hambatan dan permasalahan yang ada masih sebagaimana tahun-tahun yang lalu khususnya SDM dan sarana fasilitas.

Permasalahan yang perlu dikemukakan adalah sebagai berikut

1. Bagian Tata Usaha

- a. Dalam tahun dinas 2000 Kanwil Depnaker Propinsi Jawa Timur dan jajarannya sangat disibukkan adanya persiapan pelaksanaan Otoda yang harus selesai tahun 2001, sehingga mempengaruhi kinerja sehari-hari. Namun tugas pokok pelayanan yang sifatnya menunjang bidang teknis tidak terabaikan, misalnya sirkulasi surat menyurat.
 - Perubahan alokasi personil kaitannya dengan pelaksanaan Otoda yang selalu berubah, juga sangat mempengaruhi kinerja staf, sehingga perlu penanganan dan pengarahan langsung dari para pimpinan.

2. Bidang Binagram

Dukungan data pihak intern/extern kaitannya dengan penyusunan program dan pelayanan data laporan masih belum sebagaimana yang diharapkan.

3. Bidang Latihan dan Produktivitas

- a. Kesadaran perusahaan untuk menerima peserta OJT masih sangat rendah.
- b. Kesadaran masyarakat akan arti pentingnya sertifikat ketrampilan masih perlu ditingkatkan.
- c. Pengakuan pemerintah tentang sertifikat masih belum perhatian.
- d. SDM di LLS/HILLSI untuk penyediaan tenaga kerja bagi konsumsi dalam negeri maupun luar negeri masih jauh dari harapan.

4. Bidang Pentakerja

- a. Jumlah lulusan (pencari kerja) makin besar jumlahnya, sedangkan lowongan kerja akibat krisis yang berkepanjangan tidak seimbang/tidak bisa menampung.
- b. Keberadaan calo tenaga kerja masih dominan dalam recruit CTKI, sehingga kasus TKI ilegal masih besar.

- e. Pengantar kerja masih belum professional dalam memberikan pelayanan kepada pencari kerja dan pengguna tenaga kerja
- d. Terbatasnya kemampuan modal dan penguasaan jenis TPK dan PKSPK oleh PLTPK dan PLPKSPK.
- e. Dalam memberikan pembinaan terhadap TKPMT dan TKPMP perlu ditekankan dalam sikap mental kaitannya sifat kemandirian.

5. Bidang Hubinsyaker

- a. Hubungan Industrial
 - Dalam kesempatan pendidikan/Penas HI pengiriman peserta sering masih diwakilkan.
- b. Kendala pengiriman laporan tidak tepat waktu.
- c. Organisasi Pekerja dan Pengusaha
 - Kurang adanya kesadaran antara pekerja/pengusaha mengenai keberadaan organisasi pekerja
 - Di era reformasi banyak tumbuh organisasi pekerja, namun peraturan yang mengatur tentang keanggotaan serikat pekerja dalam LK Tripartit belum ada.
 - Tidak semua serikat pekerja sudah mempunyai/membentuk sektor, sementara pemerintah saat ini tidak bisa lagi melampaui internal serikat pekerja. Disisi lain sektor serikat pekerja yang satu dengan yang lain berbeda dan sektor SP dengan organisasi pengusahapun berbeda.
 - Dalam persaratan masalah yang paling penting adalah pembuatan KKB kaitan dengan banyaknya SP didalam satu perusahaan dan belum ada kesamaan visi diantara SP tentang KKB, sehingga memperpanjang waktu pembuatan KKB.

6. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan

- a. Kontinuitas pemeriksaan belum dilaksanakan secara baik, sehingga pemeriksaan dahulu tidak ditindaklanjuti, demikian juga didalam pembinaan. Hal ini disebabkan tata laksana yang belum tertib perlu tenaga khusus yang menangani masalah dimaksud diatas.
- b. Dari P2K3 yang terbentuk hanya sebagian kecil yang melaporkan kegiatan yang dilakukan setiap 2 (tiga) bulan sekali karena tidak adanya sanksi apabila P2K3 tidak membuat laporan.
- c. Data laporan kecelakaan belum dapat ditampilkan secara akurat karena belum sinkronnya mekanisme kerja PT, Jamsostek.
- d. Tindaklanjut Nota Pemeriksaan belum seluruhnya menunjukkan pemeriksaan terhadap pelanggaran norma-norma ketenagakerjaan, sehingga tidak dapat diketahui tingkat kepatuhan perusahaan.

7. Balai Hiperkes

Belum dipunyai tenaga dokter untuk mengatasi masalah tersebut perlu koordinasi dan bantuan tenaga dokter dari instansi lain, universitas dan perusahaan.

DISPERPUSIP JATIM

BAB IV

EVALUASI/ANALISA

1. BAGIAN TATA USAHA

- a. Peranan/Fungsi jajaran tata usaha sebagai unit pendukung bidang dan kegiatan teknis dari waktu ke waktu menunjukkan peningkatan walaupun disibukkan persiapan Otoda yang mensita pemikiran dan fisik, semua pimpinan teras Kanwil Depnaker Propinsi Jawa Timur dan jajarannya. Walaupun banyak tersita akan hal-hal tersebut diatas namun beberapa kegiatan pokok tetap ada menghasilkan, antara lain :

- Tertib administrasi yang meliputi, antara lain keuangan, kepegawaian, surat menyurat termasuk kearsipan.
- Peningkatan, percepatan, ketepatan waktu pelayanan surat ke masyarakat, instansi dan ke departemen.

b. Pembinaan dan Pengembangan personil :

- Pembinaan dan pengembangan pegawai semakin baik, antara lain usulan kursus DJJ maupun yang lain makin tinggi minat peserta.
- Penyelesaian angka kredit pegawai fungsional tepat waktu termasuk usul kenaikan pangkat dan gaji berkala.

2. BIDANG BINAGRAM

Kecepatan, ketepatan waktu akan akurasi data baik intern merupakan kendala dalam penyusunan laporan dan konsumsi data untuk instansi dan masyarakat.

3. BIDANG LATIHAN DAN PRODUKTIVITAS

Kegiatan pelatihan dan pembinaan latihan di LLS/Pemerintah dapat berjalan sebagaimana yang diprogramkan.

- Program sertifikasi untuk masyarakat dan kepentingan lain missal untuk CTKI dan tenaga kerja yang telah bekerja diberbagai bidang kegiatan.
- Peningkatan mutu tenaga pelatih baik dari instansi pemerintah dan swasta/perusahaan.

4. BIDANG PENTAKERJA

Tugas utama dari bidang ini adalah penyaluran/penempatan tenaga kerja pada job yang tepat. Untuk tahun dinas 2000 angka penempatan ada penurunan hampir 50 % kurang sedikit. Hal ini bisa dimaklumi mengingat situasi ekonomi kurang menunjang berkembangnya dunia usaha dan bisnis, sehingga banyak perusahaan yang melakukan pengurangan karyawan.

Khusus untuk pengiriman TKI ke luar negeri banyak kasus yang timbul. Kasus-kasus itu antara lain pemulangan TKI ilegal sebanyak 1.875 orang dipulangkan ke Jawa Timur dan setelah diinventarisasi kasus yang timbul sebanyak 55 kasus.

5. BIDANG HUBINSYAKER

Unjukrasa di Jawa Timur semakin marak, hal tersebut disebabkan banyak tumbuh kembang organisasi serikat pekerja baru, dimana pengursnya pada umumnya belum menguasai tentang peraturan/perundang-undangan ketenagakerjaan. Disamping baru pengusaha juga masih rendahnya tingkat pengetahuan tentang peraturan/perundang-undangan sebagaimana pekerjaanya. Disamping itu peraturan yang mengatur keanggotaan serikat pekerja dalam LK Tripartite belum ada.

6. BIDANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Angka pelanggaran dalam tahun dinas 2000 sebanyak 11.212 perusahaan terdiri dari pelanggaran Norma Umum 6.761 dan Norma Khusus 4.451 perusahaan.

Angka pelanggaran tahun anggaran 1999/2000 sebanyak 11.464 perusahaan, pelanggaran Norma Umum 4.400 perusahaan dan Norma Khusus 4.064 perusahaan. Jika melihat jumlah kasus pelanggaran dari dua tahun terakhir ini ternyata cukup tinggi. Dengan melihat angka tersebut diatas ada beberapa indikasi yang perlu diperhatikan, antara lain kegiatan Pegawai Pengawas yang masih perlu ditingkatkan dan kesadaran pekerja/pengusaha untuk melaksanakan peraturan/perundang-undangan juga perlu ditingkatkan atau dalam kata lain untuk menekan angka pelanggaran norma-norma kerja masih diperlukan kerja keras lagi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Kanwil Depnaker Propinsi Jawa Timur dapat dilaksanakan secara baik sesuai dengan target dan jadwal waktu yang ditentukan.
Demikian juga program dan pelaksanaan kegiatan Bagian, Bidang, Unit Pelaksana Teknis dan Unit di jajaran Kanwil Depnaker Propinsi Jawa Timur yang merupakan program khusus dan Umum dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal waktu yang ditentukan.
2. Secara umum pelaksanaan kegiatan pembangunan/proyek di Jawa Timur dapat selesai sesuai dengan target.

B. SARAN

Untuk pelaksanaan tahun 2001 setiap pegawai perlu mempersiapkan fisik dan mental serta perlu cepat adaptasi diri dengan lingkungan kegiatan baru dalam era OTODA.